BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana negara Republik Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) sedangkan negara Inggris menganut sistem hukum adat (*Common Law System*). *Civil law system* merupakan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh hukum Romawi klasik dan memiliki kecenderungan kondifikasi yang sama. *Common Law System* merupakan sistem hukum berbasis perkara yang berfungsi sebagai penalaran logis. Dalam sistem *Civil Law* tugas utama pengadilan, yaitu menerapkan dan menafsirkan norma hukum, sedangkan tugas utama pengadilan *common law* memutuskan sengketa para pihak, memberikan panduan bagaimana perselisihan yang sama harus diselesaikan di masa depan, penafsiran undang-undang yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus tertentu mengikat pada pengadilan yang lebih rendah sehingga dibawah *common law* keputusan pengadilan sebagai dasar untuk interpretasi undang-undang. Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara wisata yang memiliki keunikan yang dapat menarik wisatawan, banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terutama daerah provinsi Bali masih sangat didominasi wisatawan asing yang datang biasanya berasal dari Australia, India, Amerika Serikat, Singapura, Prancis, Jepang, Cina, Korea Selatan dan Inggris.¹

¹Dr. H. Salim HS, 2014, **Perbandingan Hukum Perdata**, Jakarta. Hal. 29.

Salah satunya pulau Bali yang membuat kagum Dunia dalam hal industri pariwisata. Sebutan Bali sebagai pulau yang seribu pura atau pulaunya para Dewata menjadi ketertarikan Dunia untuk lebih ingin tahu tentang Bali. Kesenian serta budaya yang begitu menarik hati wisatawan asing yang berkunjung ke pulau Bali menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka. Disamping keindahan akan tempat-tempat eksotis di Bali membuat wisatawan asing betah untuk tinggal lebih lama di Bali bahkan sampai menjadikan Bali sebagai rumah kedua mereka.²

Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bahkan ada yang hanya berlibur hingga sampai menetap tinggal untuk membuka bisnis di daerah Bali membuat semakin banyaknya wisatawan asing datang ke Bali. Ada beberapa juga yang sampai menikah dengan warga masyarakat lokal Bali membuat Bali semakin dikenal oleh dunia. Karena banyaknya wisatawan asing yang keluar masuk daerah Bali membuat mereka semakin percaya dengan sistem keamanan daerah Bali, sehingga ada beberapa wisatawan asing yang tidak hanya berlibur ke Bali bahkan ada yang sampai berinvestasi dan menyimpan modal atau deposit di salah satu bank Indonesia yakni Bank BPR LESTARI untuk menyimpan dana mereka selama hidup di Bali. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal dan turis asing, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya.³

²I Gusti Ngurah Anom, I Putu Eddy Arnwan, 2022, **Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Dibali Dengan Sistem Pinjam Nama Atau Nominee System berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Jabatan Notaris**, Volume 2, Hal. 67.

³W. Citra Juwitasari, 2017, **Pengaruh Kunjungan Wisatawan Terhadap Perubahan Sosial Budaya Ekonomis Masyarakat Lokal Bali**, Denpasar, Hal. 2.

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan, bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpundana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Beberapa pengertian bank menurut para ahli :

1. Prof G.M Verryn Stuart

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money artinya ; bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.

2. Dr. B.N Ajuha

Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest artinya ; bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif

untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.⁴

Berdasarkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat (1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; pasal 1 ayat (2) pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (3) dan (4), jenis-jenis bank terdiri dari :

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank menawarkan berbagai jenis simpanan diantaranya : simpanan giro (*demand deposit*) , simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposit berjangka (*time deposit*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (5) , simpanan : Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk

⁴ Nurul Ichsan Hasan, MA, 2014, **Pengantar Perbankan**, Ciputatat, Jakarta, hlm.2.

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan Bank memiliki beberapa jenis produk bank ayat 1 pasal (6) dan (7) dan (8) yaitu:

a. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana dengan bank.

Banyak para wisatawan asing tersebut menggunakan produk yang di berikan oleh bank indonesia untuk menyimpan dana / uang mereka di salah satu jenis produk simpanan di bank umum indonesia seperti contohnya BANK BPR LESTARI berupa simpanan deposito berjangka.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, ada beberapa Syarat ketentuan pencairan simpanan deposito berjangka di salah satu bank BPR sebagai nasabah warga negara asing (WNA) sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bank tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris yang disahkan oleh

notaris dari negara asal nasabah yang diterjemahkan oleh badan penerjemah yang bersertifikat dan surat keterangan ahli waris WNA dapat digantikan dengan surat wasiat yang dibuat oleh Nasabah WNA bersama Lawyer nasabah serta disahkan oleh notaris negara asal nasaba, surat keterangan ahli waris hanya dapat dibuat setelah Nasabah meninggal dunia dan untuk surat keterangan Ahli Waris maupun surat Wasiat WNA wajib memperoleh verifikasi dan Legalisasi dari kedutaan WNA di Indonesia.

Surat ahli waris dan surat wasiat menjadi salah satu syarat pencairan simpanan deposito apabila nasabah warga negara asing (WNA) di Indonesia meninggal dunia. Di negara Inggris dan Wales tidak memiliki dokumen seperti "surat keterangan ahli waris" dan "surat keterangan wasiat" tidak ada kewajiban hukum untuk mendapatkan surat pengurusan warisan itu sendiri. Kartu keluarga (KK) hanya dapat dibuktikan dengan ahir nama ahli waris, dengan menunjukkan copy akte pernikahan orang tua, dan copy akte kelahiran ahli waris.

Berdasarkan kajian penulis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Hukum Perdata Tentang keahli waris bagi warga negara asing di Indonesia penulis menemukan kekosongan norma hukum di dalam penelitian ini, karena di Indonesia tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang keahli warisan bagi warga negara asing, sedangkan pihak bank membuat aturan hukum yang syarat pencairan dana deposito harus dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris dan surat wasiat, negara Inggris sendiri tidak menganal dengan adanya surat tersebut.

Berpijak dengan hal tersebut diatas Penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkanya dalam sebuah tulisan karya

ilmiah dalam bentuk skripsi ini untuk memberikan gambaran dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami warga negara asing tersebut apabila di negaranya tidak menerbitkan surat keterangan ahli waris/surat wasiat, untuk mencairkan dana simpanan deposito yang mereka simpan di bank Indonesia, apabila nasabah pengguna meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat dengan dan surat keterangan ahli waris dengan judul " **PENCAIRAN DANA DEPOSITO OLEH AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING TANPA SURAT WASIAT (Studi Kasus "Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 1103/pdt.G/ PN DPs tentang Gugatan Penetapan Ahli Waris")** .

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencairan Dana Deposito Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencairan Deposito Tanpa Ahli Waris?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam Penulisan skripsi ini, untuk memudahkan menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencairan Dana Deposito Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia. Selanjutnya Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencairan Deposito Tanpa Ahli Waris.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan star 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pencairan Dana Deposito Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bentuk Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencairan Deposito Tanpa Ahli Waris.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, menurut soerjono soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti hukum.⁵

⁵Soerjono Soekanto, 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.14

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 7 (tujuh) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, penulis menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturannya perundang-undangan yang berkaitan, pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-

undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau bahan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁶

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ,
- b. Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- d. Ketetapan Pemerintah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- f. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan definisi Notaris.

⁶*Ibid.* Hal. 141.

- g. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1103/ Pdt.G/ PN DPS Tentang Gugatan Penetapan Ahli Waris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseender leer*), pendapat para sarjan, hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. atau bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.⁷

Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan , seperti;

- a. Buku-buku (*textbooks*)
- b. Skripsi terdahulu
- c. Jurnal-jurnal Hukum
- d. yurisprudensi
- e. Kasus-kasus hukum
- f. Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*.

⁷*Ibid.* Hal 145.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis dan terurut lalu dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan undang-undang, internet dan artikel. Dengan menguraikan dan menghubungkan hal tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab dan menyelesaikan terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Penelitian Hukum : melibatkan studi mendalam terhadap peraturan hukum primer yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui akses langsung kesumber-sumber hukum tersebut atau melalui basis data hukum yang terpercaya.

2. Pengumpulan bahan hukum sekunder :

- ❖ **Literatur Hukum** : melibatkan studi dan analisis karya tulis yang telah diterbitkan oleh pakar hukum , peneliti, akademis, atau lembaga hukum lainnya. Literatur hukum ini mencakup buku, jurnal, artikel, makalah, dan riset-riset terkait hukum. Sumber –sumber ini memberikan penjelasan,

interpretasi, dan pendapat-pendapat hukum mengenai peraturan-peraturan hukum yang ada.

- ❖ Dokumen Hukum Resmi: Mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau lembaga resmi lainnya, seperti laporan parlemen, keputusan-keputusan pemerintah, laporan keuangan, dan laporan resmi lainnya. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku serta proses pembentukannya.
- ❖ Preseden Hukum : Merujuk pada keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus-kasus serupa. Pengumpulan preseden hukum melibatkan penelusuran dan analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa lalu. ⁸
- ❖ Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), teknik pengumpulan dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas, dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier, ke substansi focus penelitian ini yang berkaitan dengan pencairan deposit di Indonesia, warga negara asing, dan Anglosaxon.⁹

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data, kemudian data yang diperoleh akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yaitu membuat

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Mode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 118.

⁹Soerjono Soekanto, 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14.

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, berdasarkan pengolahan data diatas selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data-data penelitian serta disusun dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normative yaitu metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum secara kualitatif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada.¹⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab I ini Penulis akan membahas tentang pendahuluan yang pada dasarnya berisi latar belakang masalah yang pembahasannya mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan gambaran tentang indonesia serta sistem hukum di indonesia daerah pariwisata di bali, wisatawan asing, dan pengertian bank menurut para ahli serta UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengertian bank menurut para ahli dan

¹⁰Sri Mamudji, *Et Al.* 2005, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 6.

ketentuan Undang-undang hukum perdata mengenai ahli waris. Yang dalam pokok pembahasan penulis menangkap inti dari latar belakang masalah tersebut sehingga terinspirasi untuk pengangkatan judul skripsi tersebut, dengan perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistem penulisan. Dimana tujuan penelitian terdiri dari 2 sub bab, yaitu ; Tujuan Umum, dan Tujuan Khusus. Dan Metode Penelitian dibagi menjadi 5 sub bab, yaitu : Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

Pada bab II ini penulis menguraikan teori-teori yang relevan sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi. Dalam sub bab ini penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan sebagai acuan pada bab 3 karena system hukum diindonesia dan inggris tidak sesuai dengan kebijakan hukum mereka jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum, Penulis juga menggunakan teori Kepastian Hukum dimana menjadi dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara apabila sistem hukum yang di anut berbeda dari sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, dan penulis juga menggunakan teori Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,

sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Pada bab III ini akan membahas mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Pencairan Dana Deposito Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia dengan menggunakan teori kepastian hukum. Dan dibagi menjadi 2 sub bab , yang pertama Penaturan tentang deposito yang dimiliki oleh orang asing di Indonesia persepektif undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang kedua Dasar Pertimbangan hakim pengambilan deposito oleh ahli waris tanpa surat wasiat, dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai dasar acuan penulis.

Pada bab IV ini penulis akan membahas mengenai Bentuk Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Pencairan Deposito Tanpa Ahli Waris dengan menggunakan teori tanggung jawab. Dan dibagi menjadi 2 sub bab , yang pertama jenis-jenis tanggung jawab dalam hukum perdata, yang kedua pertanggungjawaban Bank terhadap pencairan deposito tanpa surat wasiat.

Di dalam Bab V ini penulis akan menerangkan kesimpulan dari semua hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan menyertakan saran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui penelitian ini. Dan menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang diberikan.